

**PENGAWASAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN UPAH MINIMUM
PROVINSI (UMP) DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRAK

Khalifatur Rahmi, No. BP : 1110842008, Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Padang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2017. Dibimbing oleh: Drs. Yoserizal, M.Si dan Dr. Ria Ariany, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 189 halaman dengan referensi 10 buku teori, 4 buku metode, 2 skripsi, 9 aturan hukum, dan 6 website internet.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) merupakan institusi pemerintah di bidang sosial dan tenaga kerja yang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di Kota Padang termasuk didalamnya program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan. Dewasa ini banyaknya keluhan dari tenaga kerja ataupun ditemukan sendiri oleh pengawas ketenagakerjaan ketidakpatuhan pengusaha terhadap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga terjadinya pelanggaran. Dimana mereka tidak memberikan upah pekerja sesuai dengan besaran UMP di Kota Padang ataupun keterlambatan perusahaan membayarkan upah pekerja. Dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kota Padang yang melanggar tersebut membuat peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang mengawasi perusahaan dalam pelaksanaan penerapan upah minimum provinsi di Kota Padang

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahap-tahap dalam proses pengawasan yang dikemukakan oleh T.Hani Handoko yaitu penetapan standar pelaksanaan kegiatan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Padang masih lemah. Karena ada tiga variabel yang belum terlaksana dengan maksimal dalam pelaksanaannya, dibuktikan dengan masih adanya penyimpangan serta kekurangan yang terjadi. Pada variabel penetapan standar pelaksanaan kegiatan, kekurangannya pada tujuan, sasaran dan target tidak dibuatkan dalam dokumen/data resmi Dinsosnaker dan tidak tahunya pengawas pada aturan yang menjadi standar pelaksanaan pengawasan. Selain itu yang menjadi penghambat pada variabel penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu masalah jadwal pemeriksaan perusahaan dan minimnya sumber daya pengawas menyebabkan tidak seluruh perusahaan yang diperiksa setiap tahunnya. Terakhir pada variabel pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengamatan (observasi), adanya perusahaan yang sulit ditemui sehingga dilakukan penyesuaian rencana kerja.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP)

ABSTRACT

Khalifatur Rahmi, Registration Number : 1110842008, The Supervision of Social and Labor Service on Provincial Minimum Wage Implementation in Padang. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2017. Supervised by: Drs. Yoserizal, M.Si and Dr. Ria Ariany, M.Si. This Thesis consist of 189 pages by using 10 theory books, 4 method books, 2 theses, 9 rule of law, and 6 internet website as references.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja is a government institution in the field of social and labor that serves the entire of social and labor issues in Padang including the protection programs and labor development. Today many complaints from workers or discovered by the labor supervisors for the disobedience employers towards the implementation of the Provincial Minimum Wage so that the offences emerged. The companies do not provide worker's wages in accordance with the amount of Provincial Minimum Wage in Padang or the overdue of paying the worker's wages. Many of the companies in Padang offending makes researcher want to see how the oversight conducted by Social and Labor Service in overseeing the companies implementation on the provincial minimum wage in Padang.

The theory used in this research is the stages theory in the regulatory process proposed by T. Hani Handoko that is the implementation of standard – setting, determination of measurement implementation, measurement implementation, benchmarking and implementation of the standard, analysis of the deviation, and taking corrective action if necessary. The method used in this research is descriptive qualitative. The techniques of collecting data used in this research are interviews and documentation.

The result of field research shows that the supervision conducted by labor supervisors in the implementation of Provincial Minimum Wage in Padang is still weak. It is because there are three variables which have not been implemented maximally, evidenced by the existence of irregularities and deficiencies occur. In the standard-setting variable implementation, the shortcomings are on the goals, objectives and targets are not made in the documents / official data of Social and Labor Service and the nescience of supervisors to the rules that became the implementation standard of supervision. Besides that, inhibiting the determination of measurement implementation variable is the problem of inspection schedule and the lack of the supervisory resources cause the annually supervision on companies uncomprehensive. Last, the measurement implementation variable is the lack of facilities and infrastructure in conducting observation, there are companies which are difficult to find so it must be adjusted for the work plan.

Keywords: Supervision, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Provincial Minimum Wage